

# HUKUM DI SUATU NEGARA AKAN HANCUR JIKA INI TERJADI

Kehancuran hukum suatu negara merupakan ancaman serius yang dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Hukum adalah dasar yang mengatur kehidupan masyarakat, memastikan terciptanya keadilan, dan menjaga ketertiban. Namun, ketika hukum tidak lagi ditegakkan dengan adil atau bahkan diabaikan, maka berbagai masalah dapat muncul, yang pada akhirnya dapat menghancurkan stabilitas negara itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, negara akan menghadapi tantangan besar yang bisa mempengaruhi semua sektor kehidupan, dari pemerintah hingga rakyatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali tanda-tanda dan penyebab kehancuran hukum agar langkah-langkah pencegahan bisa segera diambil sebelum semuanya terlambat.



Kehancuran hukum bukan hanya soal hilangnya sistem hukum yang kuat, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan stabilitas nasional.

## **1. Korupsi dalam Sistem Hukum**

Salah satu penyebab utama kehancuran hukum di suatu negara adalah adanya korupsi dalam sistem hukum itu sendiri. Ketika aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, atau pejabat publik, terlibat dalam tindakan korupsi, maka hukum akan kehilangan kewibawaan dan kredibilitasnya. Korupsi merusak prinsip keadilan karena membuat hukum hanya berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan atau uang, sementara rakyat biasa sering kali diperlakukan tidak adil.

Korupsi juga menciptakan ketimpangan dalam penerapan hukum, di mana mereka yang berkuasa dapat menghindari hukuman dengan membayar sejumlah uang, sementara orang miskin yang tidak mampu akan dijatuhi hukuman yang lebih berat. Praktik ini menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum dan pemerintah. Sebagai akibatnya, masyarakat akan merasa bahwa hukum tidak lagi berfungsi untuk melindungi mereka, dan ini bisa menurunkan moralitas dan memperburuk ketidakstabilan sosial.

Jika korupsi tidak diberantas, maka hukum yang seharusnya menjadi alat penegak keadilan justru akan menjadi sarana ketidakadilan. Pada akhirnya, hukum akan terdegradasi menjadi instrumen yang memperkuat kekuasaan kelompok tertentu, dan negara akan terjerumus dalam kehancuran hukum yang sistemik.

## **2. Penegakan Hukum yang Tidak Adil**

Kehancuran hukum suatu negara juga bisa terjadi apabila penegakan hukum tidak dilakukan dengan adil dan merata. Salah satu ciri negara yang mengalami kehancuran hukum adalah adanya ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap warga negaranya. Dalam hal ini, hukum hanya diterapkan kepada kelompok tertentu atau golongan bawah, sementara golongan elit atau penguasa kebal terhadap hukum.

Misalnya, jika seseorang dengan kekuasaan atau status sosial tertentu dapat melakukan pelanggaran hukum tanpa menerima konsekuensi yang setimpal, maka hal ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat. Ketidakadilan semacam ini menyebabkan orang merasa bahwa hukum hanya berfungsi untuk kepentingan sekelompok orang dan bukan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ketika masyarakat merasa tidak ada keadilan dalam sistem hukum, mereka akan kehilangan rasa hormat terhadap hukum dan cenderung tidak mengikuti aturan yang ada.

Sebagai contoh, negara-negara yang memiliki sejarah panjang ketidaksetaraan dalam sistem hukum, seperti diskriminasi rasial, gender, atau kelas sosial, sering kali menghadapi gejolak sosial yang serius. Rakyat yang merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil akan mulai menantang otoritas negara dan sistem hukum yang ada, yang akhirnya dapat mengarah pada kerusakan lebih lanjut dalam tatanan hukum negara tersebut.

### **3. Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pemerintah**

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pejabat negara juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan kehancuran hukum. Ketika pemerintah menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membatasi kebebasan individu, melanggar hak asasi manusia, atau menyalahgunakan hukum demi kepentingan politik atau ekonomi pribadi, sistem hukum negara tersebut akan hancur.

Salah satu contoh nyata penyalahgunaan kekuasaan adalah ketika pemerintah menggunakan undang-undang atau peraturan untuk mengekang oposisi politik atau menindas kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya merusak kredibilitas hukum, tetapi juga menciptakan ketegangan politik dan sosial yang bisa memperburuk situasi negara. Ketika pemerintah tidak lagi berfungsi sebagai pelindung hukum, tetapi sebagai pihak yang melanggar hukum, rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahnya.

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dapat menciptakan keadaan di mana hukum digunakan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok, bukan untuk kesejahteraan bersama. Kondisi ini dapat menyebabkan kehancuran tatanan sosial, kerusakan ekonomi, dan hilangnya rasa solidaritas di antara warga negara.

### **4. Kelemahan dalam Pendidikan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Kehancuran hukum juga dapat terjadi karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Ketika pendidikan hukum tidak berjalan dengan baik, banyak warga negara yang tidak memahami hak dan kewajibannya. Ketidaktahuan ini membuat mereka lebih mudah untuk melanggar hukum atau tidak mematuhi aturan yang ada. Selain itu, jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum, mereka cenderung tidak peduli dengan penerapan hukum atau bahkan mendukung ketidakadilan yang terjadi.

Pendidikan hukum yang memadai sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap penerapan hukum yang adil. Tanpa adanya pemahaman yang baik mengenai hukum, warga negara akan lebih cenderung melakukan pelanggaran, sementara negara akan kesulitan untuk menegakkan aturan dengan efektif.

Penting juga untuk menciptakan budaya hukum yang menghargai keadilan dan kebenaran. Negara yang tidak memberikan penekanan pada pendidikan dan kesadaran hukum berisiko kehilangan fondasi hukum yang kuat, dan ini bisa menyebabkan hukum menjadi rapuh dan mudah dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

## **5. Hancurnya Kepercayaan Publik terhadap Institusi Hukum**

Kehancuran hukum sering kali dimulai dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintah. Jika aparat penegak hukum, pengadilan, atau lembaga negara lainnya dianggap tidak jujur, tidak efektif, atau tidak adil, maka masyarakat akan mulai mencari cara untuk menghindari hukum atau bahkan menentangnya. Hilangnya kepercayaan ini bisa membuat masyarakat menjadi apatis terhadap sistem hukum, dan ini adalah tanda awal dari kehancuran hukum di suatu negara.

Kepercayaan publik dapat hancur jika institusi hukum tidak transparan atau tidak akuntabel dalam tindakannya. Oleh karena itu, untuk mencegah kehancuran hukum, penting bagi negara untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi hukum, serta memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

## **Sumber Referensi**

1. Jurnal "The Impact of Corruption on the Rule of Law and Development" (Sumber : International Journal of Law, Crime and Justice)
2. Jurnal "Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi" (Sumber : Jurnal Hukum dan Pembangunan)
3. Buku "Penyalahgunaan Kekuasaan dan Pengaruhnya terhadap Hukum di Indonesia" oleh Muhammad Asy'ari (Penerbit: Kencana 2018)